

BAB V

KESIMPULAN

Salah satu alasan Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB adalah karena DK PBB memiliki kewenangan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kewenangan DK PBB tersebut sejalan dengan amanah pembukaan UUD 1945 untuk melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas PBB (Nugroho, 2016).

Agar tercapainya amanah tersebut, Indonesia selalu memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Salah satu cara agar Indonesia terus aktif dalam menjaga perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat memberikan ide-ide dan juga memasukkan kepentingannya dalam DK PBB untuk menjalankan amanah UUD 1945. Oleh karena itu, pada Sidang Umum PBB ke-71, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia mengajukan diri untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020 untuk kawasan Asia Pasifik. Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 akan berlangsung pada Juni 2018 (Viva, 2016). Indonesia pernah tiga kali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Selain pengalaman 3 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga memiliki kelebihan lainnya untuk dapat kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kelebihan tersebut diantaranya adalah Indonesia merupakan bukti bahwa keberagaman tidak menjadi penghalang bagi terciptanya suatu

perdamaian. Serta, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB terbanyak (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Untuk mencapai tujuannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Indonesia juga terus melakukan diplomasi melalui pola bilateral maupun multilateral. Indonesia menggunakan pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral untuk meminta dukungan dari negara-negara lain.

Diplomasi Indonesia juga terus berjalan, bahkan disela-sela Sidang Umum PBB yang ke-72, pada tanggal 18 September 2017, Indonesia melakukan diplomasi bilateral terhadap beberapa negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sebagai perwakilan Indonesia, melakukan pertemuan bilateral dengan sepuluh Negara, yaitu Samoa, Kroasia, Namibia, Niger, Liechtenstein, Ekuador, Georgia, Monaco, Tunisia, dan Swiss (Liputan6.com, 2017).

Selain melakukan pertemuan bilateral dan berhasil mendapat dukungan dari negara Ukraina, Republik Ceko, Georgia, Swedia, Luxemburg, Turki, Jepang, Kolombia, Ekuador, Chili, Venezuela, Niger, dan Sierra Leone. Indonesia juga mendapat dukungan dari beberapa negara lainnya, yaitu: Slovenia, Senegal, Angola, Mongolia, Uruguay, Bahrain, Senegal, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Thailand, Norwegia, Belgia dan Meksiko.

Indonesia juga melakukan diplomasi multilateral untuk pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota PBB pada tanggal 22 September 2016. Kampanye ini dilakukan Indonesia di depan 200 lebih tamu undangan yang merupakan para diplomat asing dan para menteri dari negara-

negara di dunia. Pada tanggal 24-25 November 2016, Indonesia juga melakukan pertemuan tingkat menteri MIKTA yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia dan meminta dukungan kepada negara Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia untuk mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Arisandy, 2016).

Pada pertemuan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) di Nusa Dua Bali pada tanggal 27 Oktober 2016, Retno L.P Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia juga terus meminta dukungan kepada negara-negara sahabat yang tergabung di *Indian Ocean Rim Association* (IORA) untuk mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Indonesia juga terus menyampaikan prioritasnya apabila terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, seperti menciptakan perdamaian dan stabilitas di tingkat global, meningkatkan sinergi yang baik antar organisasi di tingkat kawasan dan di tingkat global. Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama global untuk menindaklanjuti tantangan global seperti terorisme, radikalisme dan ekstrimisme yang bisa mengancam perdamaian antar negara dan dunia.